

CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021

VISI BUPATI SOPPENG 2021-2026 : SOPPENG YANG MELAYANI MAJU DAN SEJAHTERA

MISI ke 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

SASARAN RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah

INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) PREDIKAT =B

OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH (WTP)

TUJUAN RENSTRA : INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SASARAN RENSTRA BPKPD

Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (IPKD NILAI 76.08)

Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1) Nilai 8.49
Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2) Nilai 20
Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3) Nilai 13.91
Penyerapan anggaran (Dimensi 4) Nilai 15
Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5) Nilai 3.68
Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6) Nilai 15

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (100%)

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah (BAIK)

Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

Persentase Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK (100%)

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng (77-79)

KEPALA BPKPD											
PROGRAM				INDIKATOR				PROGRAM			
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah				1. Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu				3. Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah			
				2. Persentase Keterpenuhan SPJ Keuangan tepat waktu				Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
				3. Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu							
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				4. Persentase Tertib Asset Manajemen							
KEPALA BIDANG ANGGARAN				KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS				KEPALA BIDANG AKUNTANSI			
1. Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi (100%)				1. Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi (100%)				Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi (100%)			
2. Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (100%)				2. Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (100%)							
KASUBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA OPERASI DAN TIDAK TERDUGA			KASUBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA MODAL			KASUBID EVALUASI ANGGARAN DAN DANA TRANSFER			KASUBID PERBENDAHARAAN		
1. Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi (2 Dok)			1. Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (2 Rancangan)			1. Jumlah Dokumen SBU yang Tersusun dan Ditetapkan sebagai Biaya Masukan Pelaksanaan Kegiatan Daerah (2 SBU)			1. Jumlah Dokumen Kas dan Data Ketersediaan Transaksi Harian Daerah (2 dok)		
2. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi (2 Dok)			2. Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (2 Rancangan)			2. Persentase Pengalokasian dan Pemenuhan Kebutuhan Dana Tanggapan Darurat dan Mendesak (100%)			2. Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Terproses (100%)		
KASUBID ANALISIS KEBUTUHAN			KASUBID INVENTARISASI DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH			KASUBID PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH			KASUBID PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH		
1. Jumlah Dokumen Standardisasi Harga Satuan Barang dan Jasa yang Terkonsolidasi untuk Diterbitkan (1 Dokumen)			1. Jumlah Aset Permda dan Titik Pengajaan (50 Aset Permda dan 2 Titik Pengajaan)			1. Jumlah Dokumen Pencatatan Mutasi Barang Milik Daerah yang Terproses sesuai Regulasi (4 Dokumen)			1. Jumlah Dokumen Pemutakhiran Basis Data Bangunan Objek Pajak dan Retribusi (2 Dok)		
2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengadministrasian Barang Milik Daerah yang Terproses dan Terverifikasi sesuai Regulasi (4 dokumen)			2. Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah (100%)			2. Jumlah Jenis Obyek Pajak dan Retribusi yang Dimutakhirkan (7 Jenis)			1. Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar (203.000 SPPT)		
KASUBID PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DATA PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH			KASUBID PENAGIHAN DAN PELAPORAN PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH			KEPALA UPT BPKPD (8 KECAMATAN)			KASUBAG UMUM DAN KEPGAWAIAN		
1. Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi (8 kecamatan)			1. Jumlah Dokumen Regulasi Pengelolaan Pajak Daerah yang Terproses untuk Diterbitkan (1 Dok)			2. Jumlah Paket Bahan Logistik (3 Paket)			1. Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia (Jenis)		
2. Potensi Pajak Daerah (20.3M)			2. Jumlah Peserta yang Terafirmasi Patuh dan Taat Pajak (50 orang)			2. Jumlah dokumen RKA yang tersusun (1 dok)			2. Jumlah dokumen RKA yang tersusun (1200 SPM)		
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH			SEKRETARIS BPKPD			KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN			KASUBAG KEUANGAN		
1. Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah (100%)			1. Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (100%)			1. Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (10 Dok)			1. Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya (106 ASN)		
2. Persentase Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (100%)			2. Persentase Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			2. Jumlah SPM yang terverifikasi (1200 SPM)			2. Jumlah Paket Bahan Material yang Tersedia (2 Paket)		
			3. Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
			4. Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum								
			5. Persentase Keterpenuhan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah								
			6. Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								
			8. Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik								

KASUBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA OPERASI DAN TIDAK TERDUGA	KASUBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA MODAL	KASUBID EVALUASI ANGGARAN DAN DANA TRANSFER	KASUBID PERBENDAHARAAN	KASUBID VERIFIKASI	KASUBID PENGELOLAAN KAS	KASUBID AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS	KASUBID AKUNTANSI BARANG MILIK DAERAH	KASUBID PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	KASUBID ANALISIS KEBUTUHAN	KASUBID INVENTARISASI DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	KASUBID PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.	KASUBID PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH	KASUBID PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DATA PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH	KASUBID PENAGIHAN DAN PELAPORAN PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH	KEPALA UPT BPKPD (8 KECAMATAN)	KASUBAG UMUM DAN KEPGAWAIAN	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	KASUBAG KEUANGAN	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD (6 KECAMATAN)
3 Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (34 Dok)			3 Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem (9 SKPD)	3 Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemerintah Daerah (100%)		3 Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT (34 dok)	3 Jumlah Tenaga Pelaporan Keuangan SKPD yang handal dan bersikat dengan Nilai Baik (10 orang)		3 Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah yang Terkoreksi Kewajarannya (2 Dokumen)			3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang Digunakan dengan Baik (2 Jenis)	3 Jumlah Wajib Pajak yang sadar Pajak (190.000 WP)	3 Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar (203.000 SPPT)		3 Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (3 Jenis)	3 Jumlah dokumen RKA Perubahan yang Tersusun (1 dok)	3 Jumlah dokumen Pelaporan keuangan yang tersusun (3 dokumen)	3 Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (100 kali)
4 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (34 Dok)			4 Persentase Pengalokasian TKDD dan DO yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (100%)	4 Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (100%)					4 Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Transparan dan dapat Terakses dengan Baik (5 Dok)			4 Jumlah Wilayah yang terkendalkan dan diawasi dalam Penerimaan Pajak Daerah (8 kecamatan)	4 Persentase Capaian Realisasi Retribusi Daerah (100%)	4 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu (150.000)		4 Jumlah Paket Bahan Material yang Tersedia (2 Paket)	4 Jumlah dokumen Evaluasi yang Tersusun (9 dok)		
5 Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Terverifikasi dan									5 Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (300 kali)					5 Jumlah Obyek Retribusi yang Terkelola 12 Obyek		5 Jumlah Tamu yang terfasilitas (600 orang)			
6 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Terverifikasi dan			6 Persentase Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang Tepat						6 Jumlah Kendaraan Dina's Operasional atau Lapangan yang diadakan							6 Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (280 kali)			
																7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (89 kali)			
																8 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik (36 Kali)			
																9 Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum (2 Jenis)			
																10 Jumlah Kendaraan Dina's Jabatan yang terpelihara dan Terbayarkan STNK (295 Unit)			
																11 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Baik (39 unit)			
																12 Luas Gedung Kantor yang dipelihara (320 M2)			